

<input type="radio"/> Senin	<input type="radio"/> Selasa	<input type="radio"/> Rabu	<input checked="" type="radio"/> Kamis	<input type="radio"/> Jumat	<input type="radio"/> Sabtu	<input type="radio"/> Minggu									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
<input type="radio"/> Jan	<input type="radio"/> Feb	<input type="radio"/> Mar	<input type="radio"/> Apr	<input type="radio"/> Mei	<input type="radio"/> Jun	<input type="radio"/> Jul	<input type="radio"/> Ags	<input type="radio"/> Sep	<input checked="" type="radio"/> Okt	<input type="radio"/> Nov	<input type="radio"/> Des				

Wakil Ketua KPK Datangi Sumedang

SUMEDANG - Untuk memberikan efek jera kepada para koruptor, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus membuat para koruptor tersebut sengsara dengan mengembalikan semua uang yang dikorupsi serta membayar kerugian negara akibat perbuatan yang dilakukannya. Demikian dikatakan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojajanto di sebuah kesempatan dalam acara Stadium Generale yang dilaksanakan di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad Jatinangor, kemarin (10/10).

Menurutnya, selama ini ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang terjerat tindak pidana korupsi. Pertama adalah karena terpaksa, kedua memaksa, dan yang ketiga dipaksa. "Korupsi yang terpaksa yaitu karena kebutuhan hidup yang sangat mendesak dan sulitnya mencari uang dan serba kekurangan," terang Bambang.

Yang kedua memaksa, lanjutnya, karena ada sifat keserakahan untuk bisa hidup secara berlebihan. "Dalam artian seseorang memaksakan untuk hidup di luar batas

kemampuannya. Kemudian yang ketiga adalah dipaksa yaitu karena kelemahan sistem, sehingga seseorang bisa terjerumus kepada tindakan korupsi," sebut Bambang.

Lebih lanjut, sambung dia, pandangan masyarakat selama ini terhadap peran KPK hanya sebatas penindakan saja. Dan disitu barulah beranggapan bahwa KPK berhasil menuntaskan kasus korupsi.

"Padahal, selain penindakan, juga ada namanya pencegahan, koordinasi, monitoring, dan

supervisi sehingga disitu baru dinamakan peran strategis KPK," ujarnya.

Saat ini, KPK akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, dengan cara membuat berbagai film dan juga *adlibs* (iklan layanan masyarakat, red) berupa gambar dan audio.

"Saat ini masyarakat lebih tertarik iklan layanan masyarakat dengan menggunakan unsur gambar dan audio, jadi kini KPK membuat film dan *adlibs* untuk bisa ditonton," pungkasnya. (isl)